PERANG AFGANISTAN ANTARA AMERIKA SERIKAT DAN TALIBAN TAHUN 2021: ANALISIS TRINITAS PERANG CLAUSEWITZ

The Afghanistan War Between The United States And The Taliban In 2021: Clausewitz's War Trinity Analysis

Muhammad Izzu Saukani

Magister of International Relations Faculty of Social and Political Sciences Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia Muhammad.izzi.saukani-20221@fisip.unair.ac.id

INFO ARTIKEL Article History

Received 13 March 2023

Revised 27 July 2023

Accepted
1 August 2023

Keywords:

Afganistan; United States of America; terrorism; trinity of war; political objective.

Kata Kunci:

Afganistan; Amerika Serikat; terorism; tritungal perang; tujuan poitik.

Abstract

This article analyzes the Afghanistan war between the United States and the Taliban in 2021 through the Clausewitz war trinity in terms of the success or failure of the war. Analysis used a qualitative-explanative approach and literature study methods in collecting data and using the Trinity of War theory as an analytical tool. The results of the study show that the trinity of war aspect, which consists of the people, the military, and the government, has a major influence on the outcome of the US war in Afghanistan. The US decision to withdraw all its troops and allies in the Afghanistan war is considered a form of failure in this war. Nevertheless, this article does not deny that these conditions do not describe the failure to achieve the US political goals themselves, namely the assassination of the leader of the international terrorist organization (al-Qaida) Osama bin Laden as the main objective of the war.

Abstrak

Artikel ini menganalisis perang Afghanistan antara Amerika Serikat dan Taliban pada tahun 2021 melalui trinitas perang Clausewitz ditinjau dari keberhasilan atau kegagalan perang tersebut. Analisis menggunakan pendekatan kualitatif-eksplanatif dan metode studi literatur dalam pengumpulan data, serta menggunakan teori Perang Trinitas sebagai alat analisis. Hasil kajian menunjukkan bahwa aspek trinity of war yang terdiri dari rakyat, militer dan pemerintah memiliki pengaruh besar terhadap hasil perang AS di Afghanistan. Keputusan AS untuk menarik seluruh pasukan dan sekutunya dalam perang Afghanistan dianggap sebagai bentuk kegagalan dalam perang ini. Namun demikian, artikel ini tidak memungkiri bahwa kondisi tersebut tidak menggambarkan kegagalan tercapainya tujuan politik AS sendiri, yaitu terbunuhnya pemimpin organisasi teroris internasional (al-Qaida) Osama bin Laden sebagai tujuan utama perang tersebut.



PENDAHULUAN

Perang merupakan fenomena yang tidak bisa dipisahkan dari bagian sejarah kehidupan manusia. Bahwa tercatat dan menjadi kenyataan sejarah adalah selama 3400-an tahun kehidupan, ummat manusia hanya mengenal perdamaian selama 250 tahun, dan sisanya adalah peperangan (Kusumaatmadja, 1980). Oleh karenanya perang lahir bersamaan dengan adanya manusia, dan fenomena ini secara terus menerus terjadi di setiap fase lahirnya peradaban manusia. Maka tidaklah mengherankan hingga saat ini banyak peperangan yang terjadi.

Salah satu perang yang tidak luput dari perhatian dunia internasional adalah perang Afganistan antara Amerika Serikat (AS) dan Taliban. Perang yang terjadi dari sejak tahun 2001 hingga 2021 tersebut merupakan perang yang dimulai oleh AS dengan tujuan untuk memerangi kelompok terorisme. Serangan ini dirancang secara struktur dan terkendali untuk menghalangi Afganistan menjadi basis operasi teroris dan menyerang kemampuan militer rezim Taliban yang pada saat itu dianggap telah menyembunyikan Osama bin Laden pemimpin tertinggi al-Qaeda.

Invasi yang dilakukan AS ke Afganistan tidak terlepas dari kejadian penyerangan yang sebelumnya melanda AS, yaitu serangan terorisme internasional terhadap lambang supremasi kekuatan ekonomi dan militer AS, yakni gedung *World Trade Center* (WTC) dan Pentagon pada 11 September 2001. AS menganggap pemimpin al-Qaeda Osama bin Laden bertanggung jawab atas penyerangan yang memakan korban tewas lebih dari 3.000 orang itu (Wijaya, 2021).

Untuk mendapat pembenaran atas serangan tersebut, Afganistan dibawah kekuasaan rezim Taliban dituduh melindungi terorisme bin Laden dan dianggap telah menolak AS permintaan untuk mengekstradisi sang pemimpin al-Qaeda yang dianggap menjadi dalang penyerangan ke AS dari markas mereka di Afganistan. Pada saat itu juga AS dibawah kepemimpinan George W. Bush langsung memerintahkan melakukan penyerangan terhadap Afganistan dan menyebut operasi militernya tersebut dengan nama Operation Enduring Freedom atas dasar kebebasan dan demokrasi (Hoelhi, 2007).

Proses perang ini terus berlanjut hingga penghujung dekade pertama AS menemukan momentumnya, yakni berhasil menangkap dan membunuh Osama bin Laden. Keberhasilan AS membunuh Osama bin Laden menimbulkan berbagai pandangan tentang keamanan jangka pendek dan jangka panjang serta implikasi kebijakan luar negeri AS. Beberapa ahli menganggap bahwa kematian Osama bin Laden hanya sebagai peristiwa simbolis, sementara yang lainnya percaya bahwa peristiwa itu menandai pencapaian signifikan dalam upaya kontraterorisme AS, dan dengan optimisnya mengatakan sebagai pertanda akhir perang di Afganistan.

Namun tampaknya kematian Osama bin Laden tidak menandai berakhirnya perang. Perang antara AS dan Taliban terus bergejolak hingga perang di Afghanistan menjadi perang terpanjang yang pernah diikuti AS, yakni hampir 20 tahun lebih lama dari gabungan perang dunia I dan II. Lamanya waktu yang dihabiskan tidak terlepas dari keliruan AS dalam memahami kontekstualisasi keseluruhan permasalahan ini. AS hanya berorientasi pada penggunaan kekuatan militer seperti yang dibayangkan secara strategis selama Perang Dingin, namun gagal memahami bahwa terorisme radikalisasi memerlukan dan strategi struktural jangka panjang daripada hanya penggunaan kekuatan.

Meski demikian seiring berjalannya estafet kepemimpinan, telah terjadi pendekatan baru dalam menjalankan perang tersebut. AS dalam hal ini tidak lagi berorientasi pada kontra-terorisme berdasarkan kekuatan militer, melainkan berupaya untuk membangun bangsa untuk mencegah munculnya negara sebagai tempat perlindungan bagi Al-Qaeda dan afiliasinya (Kobek & Rodriguez, 2013).

Pada Februari 2020, presiden Donal Trump sepakat mendatangani Perjanjian Doha untuk mengakhiri Perang Afganistan secara damai. Proses perdamaian ini semakin nyata ketika estafet kepemimpinan AS dipegang oleh Joe Biden, yang pada 14 April mengumumkan akan melakukan penarikan pasukan dari Afganistan pada 11 September di tahun yang sama. Namun kenyataanya penarikan secara penuh terjadi jauh dari rentang waktu yang direncanakan, yakni penarikan sepihak selesai pada 30 Agustus 2021 (Eichensehr, 2021). Peristiwa penarikan pasukan oleh AS ini mendapatkan cukup perhatian dan memberikan dampak yang besar terhadap citra dan status dari AS itu sendiri sebagai salah satu negara hegemon di dunia internasional. AS dalam hal ini secara tidak langsung telah dianggap gagal atau kalah dalam menjalankan strategi perangnya melawan Taliban.

Penyebab keggalan AS dalam perang Afganistan telah dijelaskan oleh beberapa penelitian terdahulu. Dalam artikelnya Robert Bruce Adolph (2021) mengatakan bahwa kekalahan pasukan AS pada perang Afganistan adalah disebabkan oleh strategis perang yang dimainkan. AS pada posisi ini telah memainkan metodologi perang yang sangat beradab sehingga mengurangi insentif AS untuk berhenti perang. Adolph menyebut konvensi jenewa yang penuh dengan nilainilai kemanusiaan adalah kitab suci rujukan militer AS tentang apa yang dapat dan tidak dapat dilakukan secara legal di medan perang. Militer AS mengikuti aturan ini, sedang Taliban tidak. AS dalam hal ini memberikan begitu banyak kepentingan pada hukum dan nilai-nilai kemanusiaan. Untuk itu mundur dari pertempuran adalah merupakan pilihan yang tepat (Adolph, 2021).

Berbeda dengan Adolph, **Bobkin** (2022) mengatakan bahwa kegagalan total ini disebabkan oleh kebijakan buruk Biden dalam menangani penarikan pasukan dari Afganistan. Penarikan yang tergesa-gesa, tidak terencana, dan tidak dilaksakan dengan baik, tidak lain didasarkan pada kesepakatan keliru AS Taliban dengan yang ditandatangani oleh pemerintahan Trump. Lebih jauh artikel ini juga menjelaskan dampak buruk dari kebijakan ini, yakni mengakibatkan kekacauan baru dan memicu krisis kemanusiaan skala besar, akibat Taliban secara terbuka mengabaikan semua isi kesepakatan yang ditandatangani dengan Trump sebelumnya (Bobkin, 2022).

Dalam konteks penyebab kegagalan AS di Afganistan juga dijelaskan oleh Anne Patterson & James Hatch (2022). Tulisan ini mengklasifikasikan dua kategori penyebab kegagalan AS di Afganistan, yakni pertama menyangkut masalah strategis perang, dan kedua adalah kegagalan dalam melaksanakan berbagai tujuan kebijakan atau kegagalan eksekusi. Masalah strategis yang dimaksud adalah baik AS maupun pasukan koalisi tidak pernah dengan jelas mengartikulasikan tujuan dan strategi perang yang kredibel dan koheren di Afganistan, sehingga kondisi tersebut melahirkan kebijakan yang berubahubah tanpa adanya pertimbangan yang matang. Kondisi semakin diperparah dengan adanya masalah eksekusi kebijakan disebabkan adanya kegagalan koordinasi atau bahkan saling melemahkan. Misal pasukan AS menderita karena ketidakmampuan untuk merekrut, mempertahankan, dan mempekerjakan orang-orang berbakat, terutama personel dengan keahlian dalam budaya Afghanistan. Kemudian Kongres menghindari tugas melakukan konstitusionalnya, gagal pengawasan yang ketat dan melanjutkan pola penyerahan kekuasaan perang selama puluhan tahun kepada Eksekutif. Kurangnya pengawasan Kongres berarti bahwa kebijakan AS terhadap Afghanistan cenderung berlanjut tanpa pengawasan (Patterson & Hatch, 2022).

Lebih lanjut, beberapa penelitian terdahulu memberikan penjelasan terkait apa yang memotivasi AS untuk menarik pasukan dari Afganistan. Tulisan Fatimah Soleimani Pourlak (2022) menerangkan bahwa alasan tujuan utama AS meninggalkan Afganistan tidak lain untuk mempertahankan posisi hegemoniknya di tengah meningkatnya pengaruh Tiongkok sebagai prioritas tertinggi, diikuti oleh Rusia dan terakhir Iran. Kaitannya dengan evakuasi AS di Afganistan adalah berawal dari perubahan kebijakan luar negeri AS untuk fokus pada pusat-pusat ancaman baru dan kendali atas kekuatan Oleh karenanya baru. meninggalkan Afganistan memungkinkan AS untuk fokus pada Asia-Pasifik dan memobilisasi sumber daya menghadapi Tiongkok, begitu juga Rusia dan Iran. Inti argumen dari artikel ini adalah pengaruh Tiongkok yang semakin meningkat di Asia-Pasifik, dan selanjutnya Rusia dan Iran, merupakan variabel strategis yang menentukan dalam tindakan AS untuk

mengevakuasi diri dari Afghanistan (Pourlak, 2022). Selaras dengan ini, Leslie Vinjamuri (2022) dalam artikelnya menjelaskan bahwa kebijakan penarikan pasukan dari Afganistan oleh Biden tidak lain bertujuan untuk mengarahkan kembali kebijakan AS ke Asia-Pasifik. Untuk itu AS melakukan evaluasi dan memikirkan kembali peran militernya di Timur Tengah, serta menyelaraskan intervensi militer AS dengan evaluasi yang cermat terhadap kepentingan vital AS, yakni dengan memutuskan untuk menarik secara keterlibatannya pada penuh perang Afganistan (Vinjamuri, 2022).

Meninjau beberapa penelitian terdahulu, maka dapat diambil benang merah, yakni belum ada penelitian yang menjelaskan secara spesifik dan komprehensif terkait penyebab yang memengaruhi kegagalan AS dalam perang melawan Taliban di Afganistan, terutama ditinjau dari teori trinitas perang Clausewitz yang di dalamnya memperhatikan aspek-aspek strategis dalam mendukung kemenangan sebuah peperangan, seperti pemerintah, militer dan dukungan rakyat. Hal inilah yang kemudian menjadi gap utama yang akan dibahas dalam artikel ini.

Tentu topik ini menjadi penting untuk dibahas dan diteliti karena selama ini beberapa penelitian terdahulu hanya melihat sebagaian kecil unit analisis saja dalam meninjau kegagalan AS dalam perang melawan Taliban, tanpa melihat secara komprehensif unit-unit strategis yang saling berkaitan. Untuk itu, dalam membatasi permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini, maka rumusan masalah dari artikel ini adalah "Apa yang menyebabkan AS mengalami kegagalan dalam perang melawan Taliban di Afganistan?"

KERANGKA KONSEPTUAL

Kerangka konseptual yang dipakai dalam artikel ini adalah trinitas perang (The Trinity of War) dan tujuan politik (political objective) dari Clausewitz. Trinitas yang terdiri dari pemerintah, militer, dan rakyat dalam argumen Clausewitz merupakan kunci yang menentukan terjadinya perang, gagal, dan sukses atau tidaknya perang, maka komposisi dari ketiga trinitas harus benarbenar dipegang dalam satu kesatuan yang utuh. Hal ini dikarenakan ketiga variabel ini merupakan variabel dependen antara satu dengan lainnya saling memengaruhi. Apabila terdapat ketidaksesuaian pada salah satu variabel, maka akan berdampak pada kedua variabel lainnya yang kemudian memberikan efek pada keberhasilan dari peperangan. Bassford dan Villacres dalam Papaj (2008) menjelaskan lebih mendalam apa yang dimaksud Clausewitz dengan trinitasnya tersebut. Tulisan ini menjelaskan bahwa trinitas Clausewitz menunjukkan tiga kategori kekuatan yang krusial dalam peperangan, yaitu *irrational forces* (violent emotion), non-irrational forces, dan rationality (Papaj, 2008).

Pertama, *irrational forces* merupakan sifat kekuatan berkaitan langsung dengan rasa emosi yang timbul atau dimiliki oleh rakyat yang berhubungan dengan rasa kebencian, permusuhan bahkan kekerasan. Dengan kata lain, hasrat untuk melakukan peperangan itu ada pada diri rakyat. Dalam hal ini rakyat dijadikan sebagai *support system* atau komponen pendorong yang memberikan dukungan moral baik kepada pemerintah maupun pada pasukan militer yang sedang berperang untuk dapat secara maksimal memperoleh kemenangan dalam perang.

Kedua, adalah non-irrational forces yang diidentikkan dengan kekuatan militer dalam berbagai komponen. Militer dalam hal ini memiliki peran untuk memainkan segala bentuk kesempatan dan kemungkinan disertai dengan segala keahliannya untuk selanjutnya menentukan keberhasilan dari strategi yang sudah dirancang. Militer dan segala komponennya bertugas untuk

mengeksekusi harus dapat menjalankan tupoksinya untuk melaksanakan dan menciptakan tujuan atau kepentingan yang telah dibentuk pemerintah di medan peperangan, karena militer lah yang memiliki kapasitas dan kemampuan untuk dapat mengaplikasikan strategi dan kebijakan tersebut.

Ketiga, adalah rasionality identik dihubungkan dengan sikap rasional yang muncul dari pemerintah terutama kaitannya dengan penyelenggaraan perang. Pemerintah dalam hal ini merupakan kunci utama kebijakan perancang strategi dalam melakukan sebuah peperangan. Demikian ini terjadi karena tidak lain adalah tujuan politik menjadi landasan atau alasan utama untuk berperang merupakan urusan dari pemerintah itu sendiri. Dalam artian perang berada di tangan pemerintah dan perang tidak terlaksana pemerintah tidak jika memutuskannya. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan dituntut untuk mampu mengatur strategi dan kebijakan yang sesuai dalam melakukan pelaksanaan peperangan. Dengan catatan, reaksi dari rakyat dan militer juga diperhatikan sebagai faktor pendukung sukses atau tidaknya peperangan.

Untuk itu, ketiga komponen ini harus bersinergi dan jika salah satu dari komponen ini kemudian cacat maka akan memengaruhi hasil yang diperoleh dalam perang. Relevansi dari trinity of war inilah yang selanjutnya ditunjukkan oleh pihak AS dalam perang Afganistan melawan Taliban. Pada ketidakstabilan yang terjadi pada hubungan antara ketiga komponen, menyebabkan AS mengalami kekalahan dalam perang Afganistan.

Selain menggunakan trinitas perang, artikel ini juga mengunakan konsep tujuan politik (political objective) perang dalam menganalisis fenomena ini. Perang bukan lah sesuatu keniscayaan yang terjadi begitu saja melainkan terdapat proses yang menyertainya, seperti yang disebut Clausewitz melalui buku On War (1982), sebagai kepanjangan dari politik sebuah Clausewitz berargumen negara. perang merupakan satu dari sekian instrumen untuk mencapai cara negara suatu kepentingan politik mereka. Dengan kata lain perang merupakan sebuah arena duel antar kepentingan yang tidak lain bertujuan untuk membuat pihak lawan mau melakukan apa yang kita inginkan (Gray, 2007).

Clausewitz dan orang-orang sezamannya menyadari bahwa operasi di medan perang, seberapa cemerlang dilakukan, tidak ada gunanya jika tidak berkontribusi untuk mencapai tujuan politik. Pada akhirnya ini bukan tentang sukses di medan perang atau berhasil tidaknya perang, bukan semata dilihat dari menang atau kalahnya militer dalam medan pertempuran, melainkan dilihat dari tercapai atau tidaknya tujuan politik yang menjadi dasar melakukan perang itu sendiri. Oleh karenanya perang menurut Clausewitz, adalah bagian pokok dari aktivitas politik dan 'sama sekali bukan hal yang berdiri sendiri' (Herberg-Rothe, 2007). Kekuatan politik bertujuan untuk mengendalikan sifat perang, ini 'adalah kekuatan yang menimbulkan perang dan kekuatan yang sama yang membatasi dan memoderasinya' (Herberg-Rothe, Honig, & Moran, 2011). Konsep ini akan digunakan dalam artikel ini untuk menilai secara objektif terhadap apa yang telah dialami AS dalam Perang Afganistan.

METODE PENELITIAN

Artikel penelitian ini merupakan hasil penelitian kualitatif-eksplanatif, yakni peneliti berusaha menjelaskan keterkaitan Trinitas yang dimaksud Clausewitz yaitu komposisi dari rakyat, militer, dan pemerintah memengaruhi hasil dari perang. Tepatnya ketiga komponen Trinitas yang dimaksud Clausewitz akan diperiksa secara koheren sehingga dapat menyimpulkan hasil

perang yang dilakukan AS di Afganistan. Selain daripada itu, peneliti akan berupaya secara obyektif menilai bahwa kegagalan perang AS di Afganistan bukanlah sebagai bentuk kekalahan total AS, melainkan terdapat tujuan atau kepentingan politik yang sudah dicapai.

Kajian yang digunakan dalam artikel ini berbasis pada data sekunder melalui kajian kepustakaan, yakni mengumpulkan berbagai sumber data yang tersebar baik buku, artikel jurnal, maupun hasil penelitian baik berbentuk cetak maupun bentuk digital yang dianggap relevan dengan penelitian. Data-data dari kepustakaan tersebut dipilah dalam klaster-klaster tertentu sesuai dengan tujuan kajian, dan selanjutnya dianalisis secara interpretatif menggunakan kerangka teori yang telah disematkan dalam penelitian ini, kemudian ditarik kesimpulan secara induktif untuk menjawab permasalahan yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN Meninjau Kembali Perang Afganistan

Semenjak kejadian penyerangan World Trade Centre dan Pentagon pada 11 September 2001, Amerika dengan cepat menanggapinya dengan menyatakan perang terhadap terorisme (War On Terror). Sebagai pertanggungjawaban atas peristiwa tersebut

AS menerbitkan Kebijakan Strategi Nasional untuk memerangi terorisme oleh Pemerintahan Bush pada Februari 2002 2008: Williams, 2008), (Stohl, yang selanjutnya diperbarui pada September 2006 (Dobrot, 2007). Implikasi dari kebijakan tersebut adalah AS melakukan berbagai bentuk intervensi, yakni melalui upaya-upaya diplomasi dengan negara-negara yang dianggap memberikan dukungan pada kelompok terorisme untuk tidak lagi memberikan dukungan terhadap terorisme. Di samping itu, AS melancarkan berbagai bentuk tindakan represif, yakni melakukan penyerangan, perlawanan dan penghancuran terhadap jaringan kelompok teroris di berbagai tempat, termasuk negara-negara yang dianggap telah mendukung aksi dan organisasi terorisme.

Salah satu negara yang dituduh telah memberikan dukungan terhadap terorisme adalah negara Afganistan. Pasca kejadian penyerangan pada September 2001, AS langsung menuduh pemerintahan Afganistan yaitu Taliban telah menyembunyikan Osama bin Laden dan meminta pemimpin al-Qaeda itu untuk diekstradisi ke AS. Akan tetapi Taliban pada saat itu menolak karena berkeyakinan bahwa Osama bin Laden tidak terlibat pada peristiwa 11 September tersebut

dan meminta AS untuk menunjukkan bukti akan keterlibatan Osama bin Laden (Sinuhaji, 2021).

Penolakan tersebut membuat AS marah dan mendorong Bush pada saat itu untuk menyerang Afganistan pada 7 Oktober 2001. Bush menyebut operasi militernya tersebut dengan nama Operation Enduring Freedom Afghanistan (OEF-A) atas dasar kebebasan dan demokrasi serta menghilangkan ancaman yang mereka sebut teroris (Katzman & Thomas, 2017). Penyerangan tersebut membuahkan hasil, pada pekan pertama Desember di tahun yang sama, AS berhasil memukul mundur Taliban dari tampuk kepemimpinannya di Afganistan (BBCNews, 2021). Namun keberhasilan AS memukul mundur rezim tidak membuat Taliban berhenti melakukan perlawanan, bahkan tidak membutuhkan waktu yang lama bagi Taliban muncul dengan kekuatan barunya. Kekuatan Taliban pada saat itu semakin kuat terutama keberhasilan mereka menyusun kembali kekuatannya di Pakistan dan membuat berbagai jaringan antara fraksi Taliban dengan kelompok militan lainnya di berbagai kawasan. Oleh karenanya setelah berhasil menguasai Kabul, AS melanjutkan operasinya militernya untuk mencari bin

Laden sekaligus memberangus kelompok Taliban.

Pada tahun 2007 aktivitas yang dimainkan Taliban semakin meningkat, ditandai dengan banyaknya berbagai kejadian penyerangan pelemparan bom, dan meningkatnya taktik penembakan, pencurian terhadap orang asing dengan harapan mendapatkan tebusan. Pada tahun 2008 Taliban semakin memperlihatkan taringnya yaitu dengan meningkatkan caracara destruktif seperti penyerangan dengan taktik bom bunuh diri dalam menjalankan aksinya. Seakan ingin menuniukkan keberaniannya yang sudah mencapai puncak, pada tahun 2009 Taliban memperlihatkan kekuatannya dengan menunjukkan berbagai alat persenjataan modern yang dimilikinya. Kemudian pada tahun 2010 Taliban tidak ragu-ragu memancing baku tembak dengan pasukan koalisi internasional yang dibentuk AS, bahkan Taliban tidak segan dan berani menargetkan pangkalan militer internasional AS di Bagram (Tempo.co, 2010).

Untuk mengatasi gerakan dan berbagai serangan yang dilakukan Taliban di tahuntahun tersebut, AS menggunakan pasukan gabungan yang terdiri dari pasukan koalisi dan pasukan keamanan Afganistan yang dinamakan *International Security Assistance Force* (ISAF). AS pada saat itu mengerahkan

30 ribu pasukan tambahan (Salt, 2018), pasukan ini ditempatkan di berbagai wilayah Afganistan dengan harapan membuat Taliban semakin tertekan. Alih-alih menekan Taliban, nyatanya tekanan yang diberikan AS tidak membuat Taliban menyerah. Hal ini Taliban memiliki dikarenakan strategi jaringan (Yulianty, 2015), yakni dengan menggerakkan fraksi-fraksi yang sudah terbentuk di berbagai wilayah yang membuat Taliban dapat melancarkan gerakannya yang tidak hanya dilakukan di wilayah Afganistan bahkan juga di perbatasan Pakistan (Suwari, Sushanti, & Parameswari, 2021). Strategi gerilya Taliban tersebut tercatat berhasil mengambil alih beberapa wilayah Selatan dan Timur Afganistan.

Mengetahui hal tersebut, AS langsung meningkatkan kapabilitas kekuatan militernya, dan menurut laporan Council on Foreign Relations (2020) in "Timeline U.S. War Afghanistan", bahwa pada tahun 2009 total pasukan AS yang bergabung menjadi satuan militer di Afganistan adalah 68.000 pasukan. Setelah memperkuat kapabilitas kemudian kekuatan militernya, AS melanjutkan operasi militernya dengan koalisi bantuan pasukan ISAF-NATO. Operasi kemudian berlanjut sampai tahun 2010, namun lagi-lagi serangan tersebut belum melemahkan kedudukan masih

Taliban. Pada tahun 2011 AS kembali menambah jumlah pasukan militernya hingga tercatat pada tahun ini jumlah militer AS di Afganistan mencapai 110.000 pasukan (Gunadha, 2021). AS kemudian mengubah fokusnya dengan memburu pimpinan al-Qaeda yaitu Osama bin Laden di wilayah perbatasan Afganistan-Pakistan. Operasi yang melibatkan pasukan koalisi AS dan CIA pun berhasil membunuh Osama bin Laden pada 2 Mei di Abbottabad, Pakistan (Hardiayanti, 2017).

Setelah berhasil membunuh Osama bin Laden AS mengubah fokus agresi militernya yang offensive dengan lebih fokus pada Afganistan. platihan pasukan Oleh karenanya, AS mengubah strateginya yang berbasis "tempur" awalnya menjadi "support", dan menamakan operasi barunya tersebut sebagai Operation Freedom Sentinel (OFS). Operasi OFS ini lebih kepada memberikan supporting system terhadap pasukan pertahanan dan keamanan nasional Afganistan, baik memberikan pelatihan, pendampingan, saran, dan membantunya untuk memimpin operasi kontra-terorisme terhadap sisa-sisa al-Qaeda (Gady, 2016).

Pada perkembangannya di tahun 2018, AS tiba-tiba mengubah pola interaksinya dengan kelompok Taliban yaitu lebih meningkatkan upaya negosiasi damai. Salah satunya adalah yang terjadi pada tahun 2020 AS dan Taliban menyepakati perjanjian damai di Doha, Qatar. Trump dalam pertemuan tersebut berkomitmen untuk menarik diri dari Afganistan, termasuk militer AS juga sekutunya dan mitra koalisi, termasuk personel sipil non-diplomatik, kontraktor keamanan swasta, pelatih, penasehat, dan personel layanan pendukung yang selama ini melakukan operasi di Afganistan. Puncaknya pada tahun 2021 terjadi kesepakatan antara keduanya yaitu penarikan semua pasukan AS, sekutu dan mitra koalisis dari Afganistan (Agustin & Firmansyah, 2021).

Sekelumit Permasalahan yang Dihadapi AS pada Perang Afganistan

Terbunuhnya Osama bin Laden pada tahun 2011, merupakan sebuah titik balik kejayaan AS di Afganistan. Meskipun demikian perang yang dilakukan AS di Afganistan telah mendapatkan berbagai sekelumit permasalahan. Sekelumit permasalahan ini justru datang dari berbagai dimensi yang notabene seharusnya menjadi support system dari kelancaran aksi perang AS yang dilakukan di Afganistan.

Pertama, adalah respons yang buruk dari masyarakat AS. Setelah pasukan AS menemukan dan membunuh Osama bin Laden, banyak orang Amerika melihat bahwa dengan kematian bin Laden, tidak ada alasan lagi untuk AS berada di Afganistan. Sebulan kemudian, dalam jajak pendapat yang dilakukan Washington Post-ABC New, bahwa 54 persen orang Amerika setuju bahwa perang tidak layak untuk diperjuangkan. Setahun kemudian, survei yang sama menemukan 66 persen orang Amerika menentang perang (Phillips, 2021). Dalam survei terbaru yang dilakukan AP-NORC Center for Public Affairs Research 2021, bahwa 62 persen orang Amerika juga berpikir perang di Afghanistan tidak layak untuk diperjuangkan. Kedua partai yang selama ini mendominasi di pemerintahan AS pun demikian, 57 persen mayoritas Partai Republik dan Demokrat 67 persen memiliki pandangan yang sama. Persentase dukungan ini berbanding terbalik dengan apa yang terjadi pada tahun 2001 bahwa 93 persen dari warga Amerika mendukung pengiriman sejumlah besar pasukan AS ke Afghanistan (Shortridge, 2021).

Tren penurunan dukungan AS untuk perang di Afganistan terjadi dikarenakan bahwa masyarakat menganggap terlalu mahal untuk mengorbankan banyak korban.

Hal demikian terjadi karena tidak bisa dipungkiri bahwa perang di Afganistan telah menyebabkan banyak korban berjatuhan baik di pihak Afganistan, koalisi dan juga AS sebagai negara yang menginisiasi perang. Tercatat bahwa sejak 2001-2019 kehilangan sejumlah 2.434 pasukan dan hampir 4.000 lebih kontraktor sipil AS tewas, sedangkan di pihak pasukan koalisi tewas sebanyak 1.139 pasukan (Gollob O'Hanlon, 2020). Perang ini tidak hanya mengorbankan pasukan AS, pihak Afghanistan National Security Force (ANSF) bahkan lebih besar menelan korban, tercatat sekitar 66.000 pasukan Afganistan telah menjadi korban. Sedangkan korban dari warga sipil Afganistan sekitar 47.245 korban jiwa (Knickmeyer, 2021), dengan rata-rata sekitar 3.000 warga sipil terbunuh setiap tahun (Connah, 2021).

Protes terhadap korban perang ini sebenarnya dimulai sejak tahun 2009, saat itu terjadi demonstrasi besar-besaran di Washington, DC sejak Obama menjadi presiden. Ribuan orang Amerika turun ke jalan sambil membawa beberapa peti mati tiruan untuk memprotes korban perang di Irak dan Afganistan. Para demonstran yang juga dipimpin oleh kontingen veteran perang Irak dan Afganistan menyerukan agar semua pasukan AS dibawa pulang. Kontingen

veteran ini berkeinginan untuk menyudahi peperangan yang selama ini sarat dengan berbagai bentuk pelanggaran. Sebagaimana yang dikatakan oleh John Kerry, salah satu mantan veteran perang Vietnam mengatakan bahwa:

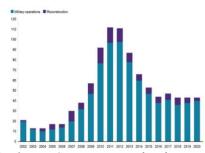
"Washington secara membabi buta telah menciptakan monster dalam bentuk jutaan orang yang telah diajari untuk berurusan dan berdagang dalam kekerasan, dan yang diberi kesempatan untuk mati tanpa alasan terbesar dalam sejarah" (Craven, 2021).

Namun para kontingen veteran ini telah lama dibungkam oleh para politisi dan jenderal yang haus akan dukungan finansial dari kontraktor militer, dan terus menyesatkan publik dalam mendorong pertempuran yang berkepanjangan.

Kedua, adalah terkait pembiayaan yang dihabiskan dalam perang Afganistan juga menjadi sorotan. Diperkirakan total pembiayaan perang yang dilakukan sejak 2001-2020 ditaksir lebih dari 2,26 triliun Dolar AS, dengan rincian sekitar 300 juta Dolar AS per hari, setiap hari selama dua dekade. Antara 2001 dan 2012, biaya perang secara bertahap meningkat, terutama setelah Presiden Obama mengumumkan

penambahan pasukan segera setelah menjabat. Biaya mencapai tingkat tertinggi pada tahun 2011 yakni meningkat sekitar 107 miliar Dolar AS per tahunnya (Helman & Tucker, 2021). Adapun lebih rincinya dapat dilihat pada Tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1. Biaya Dikeluarkan AS pada Perang Afganistan 2002-2020



Sumber: US Department of Defense

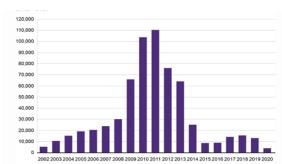
Tentu ini merupakan nominal yang sangat tinggi, terlebih sumber pembiayaan ini didanai oleh hutang. Hal ini akan sangat merugikan pengeluaran dan ekonomi AS jangka panjang untuk pemenuhan membayar hutang. Diperkirakan bahwa biaya bunga dari hasil pinjaman yang sudah dikeluarkan sekitar 500 miliar Dolar AS bunga telah dibayarkan, dan diperkirakan pada tahun 2050 ditaksir hingga 6,5 triliun Dolar AS (Knickmeyer, 2021). Menariknya ini juga terhadap berdampak langsung tingkat kesejahteraan dari warga Amerika sendiri, tercatat bahwa semenjak AS melakukan

invasi ke Irak dan Afganistan jumlah pengangguran meningkat, begitu juga kemiskinan dan naiknya harga berbagai bahan pokok, harga asuransi kesehatan naik hingga harga perumahan juga ikut naik. Hal ini dikarenakan bahwa adanya pemotongan pajak yang dilakukan pemerintahan federal hingga 8 persen (Carthy, 2019).

Ketiga, adalah dari segi kemampuan militer. Ketika AS berhasil membunuh bin Laden, serta banyaknya protes dari publik, AS pada saat itu langsung mengalihkan fokus yang awalnya dari operasi serang menjadi fokus pada pelatihan dan pendampingan terhadap militer Afganistan. Peralihan ini berdampak pada biaya yang dikeluarkan pun merosot drastis. Di tahun 2011 sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya, yang pengeluaran per tahunnya mencapai 107 miliar Dolar AS, namun di tahun-tahun berikutnya mengalami penurunan. Pada tahun 2018, misalnya, konflik ini memiliki tagihan tahunan sekitar 52 miliar Dolar AS lebih kecil dari tahun-tahun sebelumnya. Jumlah tentara yang ditempatkan Afganistan juga dikurangi, pada tahun 2011 mencapai 110.000 pasukan menurun drastis sekitar 9.800 pada tahun 2015, dan jumlah pasukan terus mengalami penurunan di tahun-tahun berikutnya. Tentu adanya hal tersebut berdampak langsung terhadap

kapasitas militer yang dimiliki oleh tentara AS di Afganistan. Akibatnya Taliban dengan mudahnya merebut kembali berbagai wilayah di Afganistan. Lebih rincinya terkait pasukan yang terlibat dapat dilihat pada Tabel 2 di bawah ini.

Tabel 2. Jumlah Pasukan AS di Afganistan 2002-2020



Sumber: Special Inspector General for Afganistan Reconstruction (SIGAR)

Keempat, adalah kontrol lemah terhadap pembiayaan yang dikeluarkan. Hal yang menjadi permasalahan yang dihadapi oleh AS adalah ketidakmampuannya mengontrol pembiayaan yang diberikan kepada pasukan nasional Afganistan. Oleh karenanya, banyak dari uang bantuan pembiayaan yang awalnya ditujukan untuk pelatihan dan pendampingan terhadap militer Afganistan dikorupsi oleh berbagai pihak kepentingan. Dan menariknya, aktor-aktor dalam pemerintahan juga tidak luput dari kegiatan korupsi ini. Pemerintah seringkali menjadi alat yang mementingkan diri sendiri politik untuk memperkaya kelas

mereka. Beberapa politisi telah membangun kerajaan bisnis mereka sendiri dengan dalih menaungi setiap upaya untuk membawa perubahan positif bagi kehidupan masyarakat. Di sisi lain para elit politik memiliki agenda etnosentris, memperburuk persaingan suku dan intoleransi politik, mengikis kemauan politik, serta meningkatkan impunitas bagi yang berkuasa.

Skandal Bank Kabul adalah contoh nyata, yakni hilangnya uang 850 juta Dolar AS hilang karena penipuan. Kejadian ini digambarkan oleh pejabat AS sebagai "penipuan per kapita terbesar dalam sejarah". Menariknya pemegang saham bank sebagian besar berasal dari elit politik negara, termasuk menteri kabinet, anggota parlemen, panglima perang, yang memang dicurigai terlibat dalam kasus tersebut (Danish, 2016). Turunan kasus korupsi ini merebak ke dalam ranah militer nasional Afganistan. Banyak di antara bantuan militer yang diberikan oleh AS dan para pendonor lainnya dikorupsikan. Tercatat bahwa sejak AS mulai melatih dan memasok bantuan ke polisi dan militer pada tahun 2002, lebih dari setengah dari bantuan tersebut, yakni 76 miliar Dolar AS dijarah dan digelapkan (Oguz, 2017).

Praktik korupsi tersebut telah menyebabkan kegagalan besar terhadap tujuan utama AS, yang selama mengupayakan peningkatan kapabilitas terhadap kemampuan militer Afganistan untuk beroperasi secara mandiri. Milisi pelatihan AS pun demikian mengakui kegagalannya tersebut, dan menyatakan bahwa selama sepuluh tahun berjalannya pelatihan, tidak ada pasukan Afghanistan yang siap berperang sendiri. Dengan kata lain, unit Afghanistan yang dapat berperang secara efektif hanya jika pasukan AS atau NATO lainnya ikut serta. Kemudian militer melaporkan bahwa hanya empat belas persen unit tentara Afghanistan yang mampu melakukannya (Brinkley, 2013).

Kapabilitas yang tidak memadai ini juga disebabkan oleh kurangnya kemampuan logistik yang dimiliki oleh militer Afganistan. Sebenarnya jika uang yang senilai 76 miliar Dolar AS tidak dikorupsikan, maka dana tersebut sudah dapat memenuhi kebutuhan semua peralatan militer Afganistan untuk 40 tahun ke depan (kata Tadbeer, mantan intelijen Afganistan, dalam Oguz, 2017). Namun banyaknya praktek korupsi dan faksionalisme yang terjadi dalam kementerian pertahanan, telah memberikan dampak yang buruk. Bahkan senjata yang sudah dimiliki sering sekali berakhir di tangan pemberontak yang melawan pasukan keamanan, akibat adanya praktik penjualan senjata secara gelap marak dilakukan.

Korupsi semacam ini secara tidak langsung telah memperparah konflik Afghanistan. Sedang kontrol dalam menyelesaikan kasus korupsi ini sangat begitu diabaikan, dan korupsi secara konsisten dibiarkan tanpa hukuman. Oleh Afghanistan karenanya, rakyat sendiri merasa dikhianati oleh para pemimpin mereka, dan para pemberontak gilirannya menyulut rasa kecewa yang meluas ini. Musuh dalam hal ini Taliban melihat kekosongan tersebut untuk diisi, yakni dengan memanfaatkan segala keadaan untuk memengaruhi rakyat yang awalnya mendukung pemerintah kembali beralih mendukung para kelompok pemberontak. Survei menunjukkan bahwa isu korupsi yang telah membumi di Afganistan telah memotivasi rakyat untuk kembali mendukung Taliban (Davis et al, 2012; Warren et al, 2016). Untuk itu, meskipun besarnya berbagai investasi material, seperti bantuan pembiayaan pelatihan militer dan dukungan tempur selama bertahun-tahun, Taliban mampu merebut sebagian besar kendali Pemerintah Afghanistan dari

Afghanistan dalam hitungan minggu, setelah AS dan misi dukungan tegas NATO dihentikan.

Trinity of War AS Pada Perang Afganistan

Jika dilihat dari fakta-fakta yang sudah dipaparkan sebelumnya, maka dapat dianalisa bagaimana trinity of war yang oleh diusung Clausewitz, yaitu kesinambungan antara tritunggal aspek perang, yaitu: irrational forces yang datang dari publik, non-irrational forces yang merupakan kekuatan militer, dan rasionality forces atau daya dari pemerintah. Ketiga aspek ini turut memberikan pengaruh penting dalam keberhasilan sebuah peperangan. Untuk lebih lanjutnya akan dibahas di bawah ini.

Aspek Publik (irrational forces)

Publik atau rakyat merupakan salah satu aspek penting dalam trinitas perang Clausewitz. Publik diposisikan sebagai faktor pendukung baik pada pemerintah maupun pada pasukan militer yang sedang berperang. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, kasus AS pada perang Afganistan, publik Amerika tidak memberikan dukungan kepada pemerintah dan militer untuk terus menerus terlibat dalam perang. AS tidak pernah berhasil meyakinkan mereka bahwa

perang itu sepadan dengan biaya yang dikeluarkan. Pada tahun 2008, perang telah membebani pembayar pajak Amerika beberapa kali lebih besar dari seluruh PDB Afghanistan. Kondisi ini terus berulang pada tahun-tahun berikutnya, dan lagi-lagi AS tidak dapat memberikan alasan yang meyakinkan untuk terus menggelontorkan uang dan nyawa dalam perang ini.

Intinya adalah rakyat Amerika akan mendukung perang ketika kepentingan vital dipertaruhkan dan ada teori kemenangan yang masuk akal. Namun sejak Perang Afganistan dimulai hingga memasuki paruh waktu priode kedua, tidak satu pun dari tersebut persyaratan yang terpenuhi. Berbagai macam protes dan kecaman dari publik pun terus disuarakan, yang akhirnya berpengaruh pada bagaimana mental prajurit dan kepala negara sebagai panglima tertinggi dalam memobilisasi sumber daya. Dikutip dari hasil penelitian RAND Corp, bahwa dari 300 lebih prajurit AS yang kembali dari Irak dan Afganistan, menderita gejala kelainan stres pasca-traumatik atau depresi, dan setengah dari mereka tidak mendapatkan perawatan. Selain itu penelitian ini juga memperkirakan bahwa 320 ribu tentara mengalami cedera otak traumatis saat mereka bertugas (Tanielian & Jaycox, 2008). Tidak jarang juga para tentara ini melakukan bunuh diri karena depresi yang dialaminya.

Ketiadaan dukungan dari publik Amerika juga berdampak pada pemerintah selaku pengambil kebijakan dalam perang. Pemerintah AS dalam hal telah memberikan pengaruh besar terhadap menurunnya kemampuan militer yang beroperasi di Afganistan, terutama terkait pada upaya pengurangan anggaran, kebijakan penarikan, serta perubahan taktik strategis yang terjadi pada pasukan keamanan nasional Afganistan. Kebijakan pelemahan terhadap kekuatan militer ini telah lama diupayakan, yakni dimulai pada masa pemerintahan Obama yang pada saat itu mengubah orientasi strategis perang yang awalnya bersifat militeristik ke pembangunan bangsa. Perubahan strategis ini yang selanjutnya diwarisi dan diteruskan oleh pemerintahan Trump dan Biden.

Aspek Militer (non-irrational forces)

Konsepsi selanjutnya yang menempatkan posisi penting dalam trinitas Clausewizt adalah militer. Posisi militer di sini amat begitu penting karena memiliki tugas untuk merealisasikan strategi yang sudah disusun sedemikian rupa oleh aktor pemerintah. Untuk itu militer yang kuat serta

cerdik dalam menjalankan strategi sangat dibutuhkan dalam memenangkan sebuah arena pertempuran.

Alih-alih untuk memenangkan peperangan di Afganistan, militer AS yang terdiri dari CIA, pasukan operasi khusus, dan pasukan gabungan terdiri dari pasukan NATO, ISAF, serta ANSF bergabung menjadi satu menghadapi Taliban. Jika melihat koalisi pasukan ini, maka dapat dikatakan AS tidak membutuhkan waktu yang lama untuk mengalahkan Taliban, karena kekuatan yang dimiliki oleh Taliban jauh lebih kecil daripada kekuatan yang dimiliki oleh AS. Namun fakta lapangan berkata lain, perang antara AS dan Taliban menghabiskan dua dekade lamanya, dan tidak kalah menjadi perhatian adalah Taliban berhasil kembali menguasai tampuk kepemimpinan di Afganistan, menandakan kekalahan militer AS dan sekutu.

Kegagagalan militer AS tentu bukan terletak pada akomodasi kekuatan yang mereka miliki. Militer AS dan semua pasukan koalisi bertempur dengan keterampilan dan akomodasi peralatan yang terlampau memadai. Yang kemudian menjadi permasalahan besar adalah telah terjadi kontradiksi strategis yang memang tidak pernah diakui dan atau diselesaikan sepenuhnya baik militer AS maupun pasukan koalisi. Kontradiksi strategis yang dimaksud di sini adalah terkait dengan permasalahan mendasar, seperti buruknya kordinasi antara pasukan, siapa musuh dan sekutu AS, dan apa yang harus coba dicapai oleh militer AS di Afganistan.

Buruknya koordinasi antara pasukan koalisi bukan menjadi rahasia umum lagi pada Perang Afganistan. Koalisi NATO misalnya, meski kehadiran koalisi ini tidak diragukan lagi dalam hal kemampuan militer, namun kehadiran NATO di Afganistan seringkali menambah nilai masalah pada misi komando yang dikontrol AS. Permasalahan di Afganistan dialami NATO yang sebenarnya merupakan masalah lama yang dapat ditelusuri sejak berdirinya organisasi pada tahun 1940-an. yang pada saat itu sebagai aliansi kontra-Soviet. NATO di dalam salah satu nota kesepakatannya, telah memberikan kontrol penuh atas pasukan dan memprioritaskan dikerahkan kesatuan politik di antara negara-negara anggota dengan mengorbankan kesatuan operasional di antara militer mereka (The North Atlantic Treaty, 1949). Fakta ini yang kemudian telah memberikan kebebasan yang begitu besar kepada negara-negara anggota, dengan rantai komando yang diperintahkan NATO kembali ke negara pasukan asal, bahkan dalam kasus rencana operasional,

arahan strategis, dan aturan keterlibatan yang telah disetujui. Untuk itu komandan pasukan negara asal tidak wajib mematuhi perintah dari komandan multinasional NATO mereka, jika mereka keberatan dengan tindakan tersebut. Dengan kata lain, tidak ada otoritas tunggal yang memimpin pasukan NATO di Afghanistan.

Permasalahan lain yang tidak kalah penting di antara negara NATO pada Perang Afganistan, adalah terjadinya opsi untuk membuat pembatasan khusus tentang bagaimana, kapan, dan di mana pasukan mereka dapat digunakan (SIGAR, 2021). Sebagian besar pembatasan pasukan ditujukan pada batasan geografis, tetapi yang lain menentukan apakah suatu pasukan dapat melakukan tindakan ofensif, tindakan defensif, atau hanya mengamati target, sedang yang lain menentukan apakah suatu pasukan dapat beroperasi pada malam hari, atau hanya pada siang hari. Pembatasan yang memberatkan ini terkadang menciptakan ketegangan dalam aliansi antara negaranegara yang membatasi pasukan mereka, dan negara-negara yang merasa menanggung beban pertempuran yang tidak adil. Oleh karenanaya, kondisi ketidakefektifan NATO dikatakan telah menghalangi dapat

kemampuan militer AS untuk memanfaatkan dukungan koalisi secara maksimal.

Kondisi yang sama juga terjadi di dalam tubuh militer AS. Taktik dan strategis militer AS telah memainkan institusi keamanan yang tidak sesuai, yakni militer AS sendiri menerapkan sistem terpusat terhadap militer Afganistan baik itu mencangkup modal maupun akomodasi peralatan yang dibutuhkan untuk bertempur. Hal ni mengharuskan AS untuk menggelontorkan miliaran dolar hanya untuk memerangi Taliban yang secara kekuatan sangat jauh dari militer AS. Kondisi ini semakin diperparah dengan adanya pengelolaan begitu buruk yang ujungnya menyulut praktik korupsi terhadap uang bantuan militer tersebut. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, AS mengeluarkan 2,26 teriliun Dolar AS untuk dua puluh tahun perang Afganistan, namun bantuan besar tersebut terbuang sia-sia.

Korupsi telah menjadi endemik dalam perang ini, dan parahnya praktik ini dilakukan oleh semua pejabat Afganistan selaku penerima bantuan. Oleh karenanya para pejabat Afganistan pada posisi ini telah menjadi samar-samar apakah mereka sekutu atau sebagai lawan. Karena bagaimanapun juga pejabat Afganistan sendirilah yang

memperparah konflik, dan mendorong banyak orang Afghanistan kembali mendukung Taliban. Kondisi seperti ini semakin menyulitkan militer yang bertugas di Afginistan, sehingga permasalahan ini berdampak terhadap apa yang harus coba dicapai oleh militer pada perang ini.

Sebenarnya sejak kematian Osama bin Laden, AS menugaskan militernya tidak lagi fokus pada al-Qaida, melainkan hanya ditugaskan untuk meningkatkan keamanan dalam rangka rekonsiliasi dan pembangunan bangsa. Namun adanya permasalahan rekonstruksi yang semakin saling terkait, yang disebabkan oleh korupsi dan kondisi keamanan yang buruk akibat daftar musuh dan prioritas yang terus meningkat, ditambah pengurangan kekuatan militer oleh pemerintah pada paruh priode kedua. membuat militer AS kesulitan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Aspek Pemerintah (rasionality forces)

Yang kemudian tidak kalah penting untuk dilihat dalam trinitas perang pada konsepsi Clausewizt adalah aktor penyelenggara perang, yakni pemerintah. Fakta yang tidak bisa dinafikan dalam kasus perang AS di Afganistan adalah setiap presiden melakukan konsolidasi atas perang yang terjadi. Perang yang selama ini

diperpanjang hanya karena masing-masing presiden tidak ingin melihat Amerika mengalami kekalahan di masa kepemimpinannya. Berbagai dinamika kebijakan tergambar di setiap masing-masing pemimpin. Di bawah pemerintahan Obama misalnya, AS pada titik tertentu memiliki elemen pendekatan yang tepat, yakni lebih mengerahkan banyak pasukan, mengeluarkan bantuan rekonstruksi, dan tidak kalah penting memainkan kontra pemberontakan (Miller, 2016). Namun terlepas dari itu, sejak terpilihnya pada tahun 2009, Obama telah mencerminkan sikap yang lebih bertentangan. Obama dalam hal ini menganggap bahwa perang itu penting berjanji untuk memperbaiki dan dan menyelesaikannya, tetapi ia juga mengesampingkan aspek-aspek lain dari perang tersebut. Ini dibuktikan bahwa Obama tidak pernah secara keseluruhan menetapkan strategi yang koheren dalam menyelesaikan perang tersebut. Obama mengerahkan lebih banyak pasukan untuk melakukan operasi kontra terorisme, namun mengenyampingkan seberapa banyak yang dibutuhkan untuk melakukan operasi kontra pemberontakan yang lebih luas.

Keadaan ini semakin diperparah dengan adanya kebijakan Obama untuk menyetujui penarikan sebagian pasukan pada

2014 2017), tahun (Saifullah, dan menerapkan pembatasan baru pada penggunaan senjata militer AS. Dalam hal ini kekuatan udara tidak lagi digunakan sebagai ofensif melawan pemberontakan, melainkan dibatasi untuk digunakan hanya untuk menargetkan beberapa anggota al-Qaeda (Salt, 2018). Semua ini dilakukan Obama akibat masifnya penekanan yang terjadi di dalam negeri oleh rakyat AS. Keputusan tersebut langsung berdampak negatif pada keamanan Afganistan karena target yang telah ditetapkan oleh AS dan sekutu NATO untuk diri mereka sendiri sangat dikompromikan. AS sama sekali tidak bisa memenangkan perang melawan kaum Islamis, pasukan keamanan Afganistan tidak terlatih untuk cukup melawan pemberontak sendirian, dan Taliban menjadi lebih kuat dari sebelumnya.

Selain itu, di awal pemerintahannya Obama meningkatkan dana rekonstruksi karena yakin bahwa pemerintahan Afganistan yang efektif adalah syarat penting untuk kemenangan. Kebijakan rekonstruksi Obama sangat dipengaruhi oleh pilihan yang dibuat oleh pendahulunya dan pemain eksternal lainnya yang mendefinisikan konteks untuk pemaksaan pembangunan negara (Gil, 2017). Akan tetapi, apa yang

telah dicapai dari semua pengeluaran itu adalah tidak demikian banyak. Menurut laporan International Crisis Group, meskipun bantuan miliaran dolar, lembaga negara tetap rapuh dan tidak mampu memberikan pemerintahan yang baik, memberikan pelayanan dasar kepada mayoritas penduduk atau jaminan keamanan manusia". Tentu kegagalan ini tidak lain karena adanya ketidaksadaran dari pemerintahan Afganistan sendiri yang semakin dibantu semakin melakukan kegiatan korupsi, dan parahnya lagi tercatat bahwa pemerintahan AS sejauh ini tidak memiliki upaya untuk mencegah permasalahan ini.

Begitupun juga di bawah pemerintahan Trump yang membawa segudang kontroversi kebijakan di Afganistan. Banyak analisis menyatakan bahwa keruntuhan yang Afganistan berakar pada kesepakatan Trump dan Taliban di penghujung pemerintahannya. Penandatanganan perjanjian Doha pada 29 Februari 2020 antara Trump dengan Taliban, telah memiliki efek yang merusak pada pemerintah Afganistan dan militernya. Perjanjian tersebut berisikan AS yang berjanji untuk menarik pasukannya secara penuh di Afganistan pada Mei 2021 dengan syarat Taliban harus berkomitmen untuk memutuskan hubungan dengan al-Qaeda dan menghentikan serangan terhadap AS, begitu juga sebaliknya AS harus menghentikan operasi serangan terhadap Taliban (Purba, Windiani, & Paramasatya, 2022).

Kebijakan ini sebenarnya dapat ditelusuri sejak awal Trump memegang tampuk kepemimpinan AS. Slogan American First yang Trump gaungkan memberikan sumbangsih terhadap pengurangan keterlibatan AS di panggung internasional, termasuk keterlibatan AS di Afganistan (Yuliantoro, Prabandari, & Agussalim, 2017). Trump melihat bahwa kehadiran militer AS di Afganistan bukanlah hal yang sangat substantif untuk menyelesaikan perang. Ia sebenarnya tidak begitu berbeda kebijakan Obama, dari yakni juga menekankan perlunya tata kelola pemerintahan yang lebih baik (Brown, 2017). Untuk itu, pendekatan yang dijalankan administrasi Trump ke Afganistan bukanlah strategi untuk menang, melainkan secara eksplisit menuntut tata kelola dan proses politik yang lebih baik dalam pemerintahan Afganistan. Tentu implikasi dari kebijakan tersebut merambat terhadap pengurangan penambahan kekuatan yang terlibat. Bahkan di penghujung kepemimpinannya Trump memberikan pengakuan politik kepada kelompok bersenjata tersebut dengan bernegosiasi langsung dengan pimpinannya (Bobkin, 2022), untuk menarik pasukannya secara penuh di Afganistan, sebagaimana yang sudah disebutkan sebelumnya.

Namun sebelum kebijakan ini populer oleh Trump, Ia digantikan oleh John Biden. Transisi kendali pemerintahan dipegang Biden yang awalnya diharapkan dapat memainkan strategi dan wajah diplomasi yang baru dari presiden sebelumnya, malah melakukan kerangka kebijakan yang sama. Biden dalam hal ini meneruskan kebijakan Trump dan semakin mendorong rencana penarikan pasukan. Melihat kebijakan yang tidak populer ini, banyak dari kalangan yang melayangkan protes. Partai Republik menuduh Biden berbohong tentang rekomendasi komandan militer untuk mempertahankan 2.500 tentara (sisa 15.500 pasukan yang ditarik selama pemerintahan Trump), dan menyatakan Biden mengalami delusi, dan menyebut kebijakan penarikan itu sebagai bencana yang tak tanggung-tanggung (Al-Jazeera, 2021). Salah satu komandan militer senior AS pun telah menganjurkan untuk mempertahankan pasukan AS di negara itu dan berpendapat bahwa penarikan dini menyebabkan dapat runtuhnya pemerintah Afghanistan, dan akan menempatkan Biden pada posisi yang sulit (Masta, 2022). Meskipun demikian, Biden bersikukuh dengan kebijakan tersebut, dan

mengatakan tinggal lebih lama di Afganistan tidak mencerminkan kebutuhan situasi gambaran ancaman global saat ini (Liptak, Herb, Starr, & Atwood, 2021).

Biden dalam hal ini meminta tinjauan kembali terhadap kebijakan realistis yang harus segera dilakukan. Biden secara tegas AS menyimpulkan bahwa akan menyelesaikan pendekatan dua dekade ini dengan menarik pasukannya dari Afganistan. Hasil tak terduga dari rencana penarikan semua pasukan tersebut dimanfaatkan oleh Taliban, kelompok pemberontak dengan cepat menguasai lusinan distrik pada periode Mei-Juni dan berhasil mendekati beberapa wilayah ibu kota provinsi. Bahkan ketika AS menetapkan tenggat waktu 31 Agustus keseluruhan pasukan akan ditarik, namun pada pertengahan Agustus pemerintah pusat berhasil dikuasai termasuk merebut penuh Kabul, dan ini berakibat pada kembalinya Taliban berkuasa di Afganistan, sekaligus dianggap sebagai kekalahan AS.

Maka benar jika melihat fakta yang terjadi AS dinyatakan gagal dalam konflik ini, dan pengaruh kesinambungan dari trinitas Clausewitz terbukti. Kesinambungan pengaruh antara ketiga komponen, yakni pemerintah, militer, dan rakyat terlihat jelas dalam kasus ini. Koherensi ketiga komponen

yang awalnya menjadi satu kesatuan yang utuh, dalam hal ini dukungan satu dengan lainnya begitu kuat, telah menjadi rapuh akibat adanya satu bahkan tiga komponen secara keseluruhan yang tidak saling mendukung, yang mengakibatkan hasil peperangan AS di Afganistan tidak begitu maksimal.

Tujuan Politik AS Pada Perang Afganistan

Hal yang kemudian menjadi penting dalam melihat strategi AS dari sisi lain adalah terkait dengan tujuan politik (political objective) pemerintah AS dalam perang Sebagaimana Afganistan. pernyataan Clausewitz, "perang hanyalah sebuah alat yang digunakan oleh pemerintah suatu untuk mencapai kepentingan negara politiknya". Untuk itu, berhasil atau tidaknya peperangan tidak bisa dilihat hanya dari menang atau kalahnya pasukan militer dalam medan pertempuran. Melainkan dapat dilihat dari tercapai atau tidaknya tujuan politik yang menjadi landasan utama dari perang itu sendiri.

Berkaitan dengan hal ini, perang yang selama ini dilakukan AS di Afganistan tujuan utamanya adalah menghalau kekuatan terorisme dan mencari Osama bin Laden pemimpin kelompok teroris internasional yaitu kelompok al-Qaeda. Kelompok ini dianggap bertanggung jawab atas penyerangan WTC dan Pentagon pada 11 September 2001, bukan bertujuan untuk menduduki Afganistan, membentuk negara baru dan atau menang perang dengan Taliban.

Kontra terorisme adalah tujuan utama kebijakan AS di Afganistan (Jones, 2004; Greentree, 2021; Malkasian, 2021), tepatnya untuk memastikan bahwa negara itu tidak menjadi surga bagi kelompok teroris salafi yang kejam seperti al-Qaeda. Premis yang mendasari kebijakan ini muncul sejak penggulingan rezim Taliban pada tahun 2001, yakni bahwa jika ada bagian dari wilayah yang dibebaskan sekali lagi berada di bawah kendali kelompok teroris salafi, kemampuan mereka untuk meningkatkan tingkat kematian dan frekuensi serangan teroris, termasuk terhadap aset AS akan tumbuh. Di samping itu, kelompok teroris tersebut bisa saja menggunakan wilayah tersebut untuk merencanakan, dan melatih operasi mereka serta sebagai tempat berlindung yang aman dari pembalasan AS internasional. dan komunitas Namun, kepentingan AS di Afghanistan lebih dari sekedar memerangi terorisme. Afghanistan tidak berisiko yang stabil juga mendestabilisasi nuklir Pakistan, dan akibatnya menggoyahkan seluruh wilayah Asia Tengah dan Selatan (Brown, 2017). Kondisi inilah yang sama sekali tidak diinginkan oleh AS.

Tujuan demikian ini juga diperjelas oleh AS itu sendiri, sebagaimana presiden Biden katakan bahwa pemerintahannya sudah tepat mengambil keputusan untuk mengakhiri keterlibatan AS di Afganistan, dengan alasan bahwa misi kontra terorisme AS telah selesai (Azria & Ramayani, 2022). Pernyataan ini juga dipertegas Biden dalam pidatonya yang menyatakan:

"Kami pergi karena dua alasan: satu, untuk membawa Osama bin Laden ke gerbang neraka, seperti yang saya katakan saat itu. Alasan kedua adalah untuk menghilangkan kapasitas al-Qaeda untuk menghadapi lebih banyak serangan ke Amerika Serikat dari wilayah itu. Kami mencapai kedua tujuan itu — titik... Pekerjaan itu telah berakhir untuk beberapa waktu. ... Kami tidak pergi ke Afghanistan untuk membangun negara. Dan itu hak dan tanggung jawab rakyat Afghanistan sendiri untuk memutuskan masa depan mereka dan bagaimana mereka ingin menjalankan negara mereka" (Biden, 2021).

Dengan ini, terlepas dari banyaknya nyawa menjadi korban, ongkos ekonomi, dan kerugian militer yang dikeluarkan, serta kwalahannya AS dalam menghadapi kelompok Taliban di Afganistan dalam berbagai medan pertempuran. Maka apa yang telah menjadi keputusan AS dalam menarik semua pasukannya di Afganistan tidak bisa sepenuhnya dianggap sebagai suatu bentuk kegagalan atau kekalahan total AS dalam perang menghadapi Taliban di Afganistan. Melainkan sebagai bentuk keharusan yang harus diambil karena tujuan dari intervensi AS ke Afganistan sudah dianggap tercapai dari tujuan dasar utama melatarbelakangi perang tersebut. Tegasnya, AS bisa dikatakan kalah dalam menghadapi Taliban di medan pertempuran, namun secara keseluruhan perang yang dilakukan AS di Afganistan telah mencapai kepentingan politik yang diinginkan AS dalam perang tersebut.

SIMPULAN

Jika dilihat berdasarkan *trinity of war*, maka ketidaksinambungan antara pemerintah, militer, dan publik AS telah memberikan pengaruh besar terhadap perang AS di Afganistan. Akan tetapi, sukses atau tidaknya perang dapat dilihat dari tercapainya

political objective. Dengan kata lain perang bukanlah tujuan itu sendiri, melainkan semata-mata hanya sebagai alat bagi pemerintah untuk mencapai tujuan politiknya. AS mengalami kegagalan dalam perang Afganistan melawan Taliban, akan tetapi mereka tidak kalah dalam pencapaian kepentingan politiknya melalui perang.

Untuk itu, banyak analisis yang diluar sana mengatakan bahwa AS dalam perang Afganista ini sudah menyandang status kekalahan total, akan tetapi artikel ini secara objektif melihat bahwa hal itu keliru besar. Oleh karenanya, yang diperlukan dalam melihat sebuah fenomena adalah perlunya suatu analisis yang bersifat integratif secara keseluruhan terhadap suatu fenomena internasional termasuk fenomena perang yang terjadi antara AS-Taliban.

REFERENSI

Adolph, R. B. (2021). Why America Lost the War in Afghanistan. *Atlantisch Perspectief, Vol. 45, No. 5*, 9-13.

Agustin, D., & Firmansyah, T. (2021, Juli 9).

Biden Umumkan Penarikan Pasukan

AS di Afghanistan Dipercepat. Dipetik

April 3, 2022, dari Republika:

https://republika.co.id/berita/qvyazv37

7/biden-umumkan-penarikan-pasukanas-di-afghanistan-dipercepat

- Al-Jazeera. (2021, September 30). *US* general says Afghanistan collapse rooted in Trump-Taliban deal. Dipetik Juli 17, 2022, dari Al-Jazeera: https://www.aljazeera.com/news/2021/9/30/us-generals-say-afghanistan-collapse-rooted-in-trump-taliban-deal
- Azria, K., & Ramayani, E. (2022). The History Of The Aghanistan War From The Time To Now. *Jurnal Power In International Relation*, Vol. 6, No. 2, 122-137.
- BBCNews. (2021, Agustus 16). Siapakah Taliban? Sejarah kelompok yang kini menguasai kembali Afghanistan. Dipetik April 3, 2022, dari BBC News: https://www.bbc.com/indonesia/dunia-58200920
- Biden, J. (2021, Agustus 31). Remarks by President Biden on the End of the War in Afghanistan. Dipetik April 24, 2022, dari WH.GOV: https://www.whitehouse.gov/briefingroom/speechesremarks/2021/08/31/remarks-by-president-biden-on-the-end-of-the-war-in-afghanistan/
- Bobkin, N. N. (2022). The End of the War in Afghanistan: The Defeat of the United States and the Consequences for Regional Security. Russian Journal of Contemporary International Studies, Vol. 92, No. 4, 331-339.
- Brinkley, J. (2013). MONEY PIT: The Monstrous Failure of US Aid to Afghanistan. *World Affairs, Vol. 175, N. 5*, 13-23.

- Brown, V. F. (2017). President Trump's Afghanistan Policy: Hopes And Pitfalls. Washington: Foreign Policy at Brookings.
- Brown, V. F. (2017, Agustus 29). *The fatal* flaw in President Trump's approach to the war in Afghanistan? Dipetik Juli 18, 2022, dari Brookings.edu: https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2017/08/29/the-fatal-flaw-in-president-trumps-approach-to-the-war-in-afghanistan/
- Carthy, N. (2019, September 12). *The Annual Cost Of The War In Afghanistan Since 2001*. Dipetik April 4, 2022, dari Forbes.com: https://www-forbes-com/sites/niallmccarthy/2019/09/12/th e-annual-cost-of-the-war-in-afghanistan-since-2001-infographic/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id &_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=op,sc
- Connah, L. (2021). US Intervention In Afghanistan: Justifying The Unjustifiable? *South Asia Research, Vol. 41, No. 1*, 70-86.
- CouncilonForeignRelations. (2020). *U.S War Afganistan 1999-2021*. Dipetik April 3, 2022, dari Council on Foreign Relations: https://www.cfr.org/timeline/us-war-afghanistan
- Craven, J. (2021, Agustus 19). Veterans Wanted to End the Afghanistan War Years Ago. No One Listened. Dipetik April 28, 2022, dari The Soapbox: https://newrepublic.com/article/16331 6/veterans-opposed-afghanistan-warno-one-listened

- Danish, J. (2016, Nonember 3). Afghanistan's corruption epidemic is wasting billions in aid. Dipetik Juni 28, 2022, dari The Guardian:

 https://www.theguardian.com/global-development-professionals-network/2016/nov/03/afghanistans-corruption-epidemic-is-wasting-billions-in-aid
- Davis, P. K., Larson, E. V., Haldeman, Z., Oguz, M., & Rana, Y. (2012). Understanding and Influencing Public Support for Insurgency and Terrorism. Santa Monica: RAND Corporation.
- Dobrot, L. A. (2007). *The Global War On Terrorism: A Relegious War?* the Strategic Studies Institute.
- Eichensehr, K. (2021). U.S. Withdraws from Afghanistan as the Taliban Take Control. *American Journal of International Law, Vol. 115, No. 5*, 745-753.
- Gady, F.-S. (2016, September 8). US Army to Deploy 1,400 Airborne Troops to Afghanistan. Dipetik April 4, 2022, dari The Diplomat: https://thediplomatcom./2016/09/us-army-to-deploy-1400-airborne-troops-to-afghanistan/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id & x tr hl=id& x tr pto=op,sc
- Gil, G. (2017). The Obama Administration's State-Building In Afghanistan. *Teka Kom. Politol. Stos. Międzynar, Vol. 12, No. 2*, 85-103.

- Gollob, S., & O'Hanlon, M. E. (2020). *Afghanistan Index*. Foreign Policy at Brookings.
- Gray, C. S. (2007). Carl von Clausewitz and the theory of war. Dalam C. S. Gray, War, Peace and International Relations: An Introduction to Strategic History (hal. 15-30). New York: Routledge.
- Greentree, T. (2021). What Went Wrong in Afghanistan? *Parameters, Vol. 51, No.* 4, 7-22.
- Gunadha, R. (2021, Agustus 17). Berapa Uang dan Nyawa Warga Amerika Cs yang Tersia-sia di Afganistan? Dipetik April 3, 2022, dari Suara.com: https://www.suara.com/news/2021/08/17/204226/berapa-uang-dan-nyawa-warga-amerika-cs-yang-tersia-sia-diafganistan
- Hardiayanti, S. (2017). Kebijakan Militer Pemerintah Amerika Serikat Dalam Memerangi Kelompok Taliban di Afghanistan Pada Kepemimpinan Barack Obama Periode 2009-2012. . *Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Vol. 3, No.* 1, 1-39.
- Helman, C., & Tucker, H. (2021, Agustus 16). *The War In Afghanistan Cost America* \$300 Million Per Day For 20 Years, With Big Bills Yet To Come. Dipetik April 4, 2022, dari Forbes.com: https://www.forbes.com/sites/hanktucker/2021/08/16/the-war-in-afghanistan-cost-america-300-million-

- per-day-for-20-years-with-big-bills-yet-to-come/?sh=4f9d74ad7f8d
- Herberg-Rothe, A. (2007). Clausewitz's Puzzle: The Political Theory of War. Oxford: Oxford University Press.
- Herberg-Rothe, A., Honig, J. W., & Moran, D. (2011). *Clausewitz: The State and War*. Stuttgart: Franz Steiner Verlag.
- Hoelhi, M. (2007). *Di Ambang Kehancuran Amerika*. Jakarta: Grafindo Khazanah Ilmu.
- Jones, R. W. (2004). America's War on Terrorism: Religious Radicalism and Nuclear Confrontation in South Asia. Dalam S. P. Limaye, R. G. Wirsing, & M. Malik, *Relegious Radicalism And* Security In South Asia (hal. 273-320). Hawai: Asia-Pacific Center for Security Studies.
- Katzman, K., & Thomas, C. (2017).

 Afghanistan: Post-Taliban
 Governance, Security, and U.S. Policy.
 USA: Congressional Research Service.
- Knickmeyer, E. (2021, Agustus 17). Costs of the Afghanistan war, in lives and dollars. Dipetik April 4, 2022, dari Apnews.com:

 https://apnews.com/article/middle-east-business-afghanistan-43d8f53b35e80ec18c130cd683e1a38f
- Kobek, M. L., & Rodriguez, M. G. (2013). The American Way of War: Afghanistan and Iraq. *Revista Enfoques, Vol. 11, No. 18*, 77-101.
- Kusumaatmadja, M. (1980). *Hukum* Internasional Humaniter dalam

- Pelaksanaan dan Penerapannya di Indonesia. Bandung: Bina Cipta.
- Liptak, K., Herb, J., Starr, B., & Atwood, K. (2021, April 13). Biden to announce withdrawal of US troops from Afghanistan by September 11. Dipetik Juli 19, 2022, dari CNN: https://edition.cnn.com/2021/04/13/pol itics/biden-afghanistan-withdrawal/index.html
- Malkasian, C. (2021). *America's War in Afghanistan: A History*. New York: Oxford University Press.
- Masta, A. Y. (2022). Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat: Perjanjian Damai dengan Taliban Tahun 2020. *Society, Vol. 10, No. 2*, 198-210.
- Miller, P. D. (2016, Februari 15). *Obama's Failed Legacy in Afghanistan*. Dipetik Juli 117, 2022, dari The American Interest: https://www.the-american-interest.com/2016/02/15/obamas-failed-legacy-in-afghanistan/
- Oguz, Y. S. (2017, Agustus 13). *Half US*military aid to Afghanistan stolen,
 expert says. Dipetik Juli 28, 2022, dari
 World Asia Pacific:
 https://www.aa.com.tr/en/asiapacific/half-us-military-aid-toafghanistan-stolen-expertsays/883724#
- Papaj, C. J. (2008). *Clausewitz 21st Century Warfare*. Pennsylvania: U.S. Army War College.
- Patterson, A., & Hatch, J. (2022). The Twenty-Year War: Lessons Learned from U.S. Failures in Afghanistan

- 2001–2021 . Yale Jackson School of Global Affairs.
- Phillips, A. (2021, Agustus 19). When and how Americans started souring on the war in Afghanistan. Dipetik April 3, 2022, dari The Washington Post: https://www.washingtonpost.com/politics/2021/08/18/when-how-americansstarted-souring-war-afghanistan/
- Pourlak, F. S. (2022). US withdrawal from Afghanistan; Reflection of Rebalancing Strategy. *Political and International Approaches, Scinetific & Research Quarterly, Vol. 13, No. 2*, 233-258.
- Purba, S. P., Windiani, R., & Paramasatya, S. (2022). Kebijakan Amerika Serikat Menyetujui Perjanjian Perdamaian dengan Taliban dan Penarikan Pasukan Amerika Serikat dari Afghanistan di Masa Kepemimpinan Donald Trump. *Journal of International Relations, Vol.* 8, No. 3, 346-356.
- Saifullah, M. (2017, Januari 19). *Obama leaves behind a mess in Afghanistan*. Dipetik Juli 17, 2022, dari DW.com: https://www.dw.com/en/obama-leaves-behind-a-mess-in-afghanistan/a-37192534
- Salt, A. (2018). Transformation and the War in Afghanistan. *Strategic Studies Quarterly, Vol. 12, No. 1*, 98-126.
- Shortridge, A. (2021, Oktober 7). *The U.S.* War in Afghanistan Twenty Years On: Public Opinion Then and Now. Dipetik April 3, 2022, dari Council on Foreign

- Relations: https://www-cfrorg.translate.goog/blog/us-warafghanistan-twenty-years-publicopinion-then-andnow?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_ hl=id&_x_tr_pto=op,sc
- SIGAR. (2021). Ehat We Need To Learn:

 Lesson From Twenty Years of

 Afganistan Reconstruction. Arlington:

 Special Inspector General for

 Afghanistan Reconstruction.
- Sinuhaji, J. (2021, Agustus 26). *Taliban Klaim Tidak Ada Bukti Osama bin Laden Dalang Serangan 11 September 2001 atau Dikenal 9-11*. Dipetik April 3, 2022, dari Pikiran Rakyat: https://www.pikiran-rakyat.com/internasional/pr-012473143/taliban-klaim-tidak-ada-bukti-osama-bin-laden-dalang-serangan-11-september-2001-atau-dikenal-9-11
- Smith. (1990). The Womb of War: Clausewitz and International Politics. Review of International Studies, Vol. 16, No. 1, 39-58.
- Stohl, M. (2008). The Global War on Terror and State Terrorism. *Perspectives on Terrorism, Vol. 2, No. 9*, 4-10.
- Suwari, N. W., Sushanti, S., & Parameswari, A. A. (2021). Rasionalitas Amerika Serikat dalam Perjanjian Damai dengan Taliban Pasca Konflik Di Afganistan. Diskusi Ilmiah Komunitas Hubungan Internasional, Vol. 1, No. 1, 1-15.

- Tanielian, T., & Jaycox, L. H. (2008).

 Invisible Wounds of War:

 Psychological and Cognitive Injuries,
 Their Consequences, and Services to
 Assist Recovery. Santa Monica: RAND
 Corporation.
- Tempo.co. (2010, Mei 19). *Taliban Serang Pangkalan Udara Bagram, Tujuh Tewas*. Dipetik April 3, 2022, dari

 Dunia Tempo:

 https://dunia.tempo.co/read/248908/tal

 iban-serang-pangkalan-udara-bagram
 tujuh-tewas/full&view=ok
- Vinjamuri, L. (2022). Biden's Realism, US Restraint, and the Future of the Transatlantic Partnership. *LSE Publi Policy Review, Vol. 2, No. 9*, 1-6.
- Warren, Z., Rieger, J., Maxwell-Jones, C. E., & Kelly, N. (2016). *Afghanistan in 2016: A Survey of the*. San Francisco: The Asia Foundation Report.

- Wijaya, P. (2021, Agustus 16). *Begini Awal Mula Terjadinya Perang Afghanistan*.

 Dipetik April 2, 2022, dari Merdeka.Com:

 https://www.merdeka.com/dunia/begin i-awal-mula-terjadinya-perangafghanistan.html
- Williams, P. D. (2008). Security Studies an *Introduction*. New York: Routledge.
- Yuliantoro, N. R., Prabandari, A., & Agussalim, D. (2017). Pemilihan Presiden Tahun 2016 dan Politik Luar Negeri Amerika. *Jurnal Hubungan Internasional*, Vol. 5, No. 2, 193-209.
- Yulianty, A. (2015). Strategi Taliban dalam Menghadapi Tekanan Amerika Serikat Pasca Jatuhnya Rezim Taliban di Afghanistan. Jakarta: Skripsi, UPN Veteran Jakarta.